

**KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA  
DI DESA SURYA INDAH KECAMATAN PANGKALAN KURAS  
KABUPATEN PELALAWAN**

**CAHAYA PRIMA NIRWANA**

E-Mail : [cahayaprima11@gmail.com](mailto:cahayaprima11@gmail.com)

**Pembimbing** : Dr. Harapan Tua, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

*Government's competence is the important aspect for the rural development of Surya Indah. Training which is done by the Government of Surya Indah must be fit to the general training in order to produce the quality human resources. But the budgetary funds for the training is too low. Informations which is gotten from villagers said that the government is not good enough for the administration services.*

*This research used theory of Badan Kepegawaian Negara says that competence is defined by indicators of knowledge, skill, and attitude. This research is classified as qualitative descriptive, the technique of collecting data in this research through observation and interview from everyone who are involved as informen.*

*The result of this research shows that the competence of government in the Surya Indah village runs well. This is proved from the result of interviews and observation data about aspects knowledge, skills and attitude of government to improve rural development. Factors which influences of the competence of the rural government are formal education, training and working experience. Development in Surya Indah are good enough proved from facilities and infrastructures are complete for community life.*

**Key words:** *Competence, Government, Development*

## PENDAHULUAN

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa melalui pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar rakyat Indonesia berada dan hidup di daerah pedesaan, sehingga itu arah kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional banyak yang tertuju kepedesaan, dengan maksud utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang umumnya masih rendah. Pembangunan pedesaan dipercepat dalam rangka memberdayakan masyarakat terutama petani melalui penyediaan prasarana, pembangunan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah . Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis

memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Desa dalam posisi tersebut memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Menurut Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll) maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat keterangan tidak mampu, SKCK, SIUP, urusan – urusan pertanahan ataupun surat keadministrasian lainnya.

Sebagai unit terbawah dari sebuah sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa diperhadapkan pada kondisi yang sangat sulit sebagai imbas dari adanya perubahan paradigma pemerintahan dari yang sentralistik

ke desentralistik seiring dengan diterapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyusul Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Konsekuensi logis yang menyertai diberlakukannya Undang-Undang tersebut, adalah harus dipersiapkan oleh setiap strata pemerintahan, mulai dari pemerintah nasional (pusat) sampai pemerintah desa adalah bahwa disatu sisi, pemerintah (pusat) harus bersedia memfasilitasi setiap perubahan sebagai tuntutan implementasi UU tersebut yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) bahkan pada strata pemerintahan desa, dan disisi yang lain, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dan pemerintah desa berkewajiban mempersiapkan diri untuk melakukan penataan atas tuntutan perubahan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak otonomi daerah (termasuk otonomi asli desa).

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah. Rendahnya kinerja aparat pemerintah desa diindikasikan dengan masih banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti pengurusan surat-surat kependudukan, surat-surat tanah, keterangan lahir dan lain-lain. Kondisi ini berlaku di desa Surya

Indah Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai lokasi penelitian ini. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki aparat pemerintah desa itu sendiri, seperti tingkat pendidikan formal, pelatihan/keterampilan atau pendidikan nonformal, pengalaman dalam menjalankan tugas dan besarnya kontra prestasi atau kompensasi yang diterima adalah merupakan faktor-faktor yang turut menentukan sejauh mana kompetensi aparat pemerintah desa itu sendiri.

**Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa di Desa Surya Indah**

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|----|------------------|--------|----------------|
| 1  | SD               | 1      | 12,5           |
| 2  | SMA              | 6      | 75             |
| 3  | SARJANA          | 1      | 12,5           |
|    | <b>Jumlah</b>    | 8      | 100            |

**Sumber : Kantor Desa Surya Indah, 2016**

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa pemerintahan Desa Surya Indah memiliki pendidikan terakhir terbanyak pada tingkat SMA yaitu sebesar 75 %. Informasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal pemerintah Desa Surya Indah cukup tinggi. Tingkat Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kompetensi dari pemerintahan desa.

**Tabel 1.2 Peningkatan Kualitas Aparat Desa Surya Indah**

| N O | TA HUN | JENIS PELATIHAN                          | BAN YAK NYA | SUM BER DAN A |
|-----|--------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1   | 2013   | studi banding                            | 1           | ADD           |
| 2   | 2014   | studi banding                            | 1           | ADD           |
| 3   | 2015   | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1           | ADD           |

**Sumber: Kantor Desa Surya Indah, 2016**

Faktor lain yang mempengaruhi kompetensi pemerintah desa adalah pelatihan atau pembinaan dan bimbingan. Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa pelatihan yang sempat diikuti oleh aparat pemerintah Desa Surya Indah masih relatif sangat kurang yaitu hanya melaksanakan studi banding dan pelatihan hanya sebanyak 1 kali. Pelaksanaan studi banding pada umumnya hanya mengedepankan aspek rekreasi saja.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Surya Indah diperoleh bahwa pendapatan total Desa Surya Indah tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.572.938.000. Alokasi anggaran dana desa Surya Indah pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.3

**Tabel 1.3. Alokasi Anggaran Dana Desa Surya Indah Tahun 2015**

| N O | BIDANG                          | ANGGA RAN                  | PERS ENT ASE (%) |
|-----|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1   | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 412.757.000,-          | 26,24            |
| 2   | Pelaksanaan Pembangunan Desa    | Rp. 1.108.181.000,-        | 70,45            |
| 3   | Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. 28.000.000,-           | 1,78             |
| 4   | Pemberdayaan Kemasyarakatan     | Rp. 24.000.000,-           | 1,53             |
|     | <b>Total</b>                    | <b>Rp. 1.572.938.000,-</b> | <b>100 %</b>     |

**Sumber : Kantor Desa Surya Indah, 2016**

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa anggaran dana untuk pelaksanaan pembangunan desa sangat tinggi sebesar 70,45 % sedangkan pembinaan masyarakat termasuk pemerintah desa hanya sebesar 1,78 %. Pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola dana dan melaksanakan rencana pembangunan. Oleh karena itu perlu ditinjau kompetensi pemerintah desa itu sendiri sehingga pembangunan desa dapat berjalan optimal.

Menurut Zamhur Das Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalokasikan dana pembangunan desa sebesar 29 Miliar Rupiah kemudian melonjak dua kali lipat pada tahun 2016 sebesar 66 Miliar Rupiah diperuntukkan untuk 104 desa.

Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tingkat Kabupaten perlu dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi penyelewengan dana dalam jumlah yang besar. Pengelolaan dana desa perlu dikelola oleh aparat pemerintah yang memiliki kompetensi yang baik sehingga dapat tersalurkan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam menerima pelayanan publik yang baik dari aparat pemerintah desa dimana staf di desa sering tidak ada di tempat untuk memberikan pelayanan. Waktu pelayanan juga tidak maksimal dengan alasan tidak ada lagi masyarakat datang untuk mengurus sehingga harus pulang untuk mengurus urusan-urusan yang sifatnya pribadi, dan pada saat ada kegiatan di kecamatan maupun di kabupaten yang sifatnya melibatkan staf desa kegiatan di kantor desa diliburkan. Kondisi ini menyebabkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintah desa yang menunjang keberhasilan pembangunan desa menjadi rendah. Padahal pembangunan desa yang merupakan keterpaduan antar berbagai kebijakan pemerintah dengan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat, perlu didukung dengan kompetensi pemerintah dalam menciptakan iklim keterpaduan yang serasi dan berkesinambungan dalam memanfaatkan segala sumber daya di desa untuk didayagunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka penulis tertarik

untuk menelitinya lebih lanjut untuk membuktikan benar-tidaknya dugaan ini, dengan judul : KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SURYA INDAH KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN.

Berdasarkan dari uraian yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?
2. Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

Tujuan Penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kompetensi pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

## KONSEP TEORI

Dalam Rangka teori ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan mendukung permasalahan yang akan dibahas. Menurut Spencer & Spencer dalam Palan (2007:84) kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang

diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Sedangkan menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut **Badan Kepegawaian Negara (BKN) (2003:110)** standar kompetensi mencakup tiga hal, yaitu disingkat dengan KSA:

- a. Pengetahuan (knowledge), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis;
- b. Keterampilan (Skills), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit;
- c. Sikap (Attitude), yaitu yang ditujukan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Kompetensi diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. **Trijono (2007:3)** menyatakan pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik

terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Tujuan umum (*goals*) pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. Sedangkan tujuan khusus (*objektives*) pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. Target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan (**Nasution 2007: 28-29**).

Menurut **Tjahja Supriatna (2000:10)** pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian diskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang

dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori, yaitu tentang Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat atau keadaan kelembagaan, masyarakat. *Key informan* adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan Masyarakat Desa

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer ini yaitu data mengenai Pembangunan ketengakerjaan diperoleh secara langsung dari informen. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi langsung mengenai Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Surya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yang dapat menunjukkan objek yang di

teliti berupa: kompetensi pemerintah desa, pembangunan desa Surya Indah literatur – literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, skripsi, dan tesis serta informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang diteliti. Bentuk observasi yang dilakukan dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen dengan teknik pengamatan terbuka di mana keberadaan pengamat diketahui oleh subjek yang diteliti dan subjek memberi kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan tidak berstruktur



dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan pewawancara dengan secara leluasa dalam memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai untuk penelitian kualitatif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen baik itu dokumen yang tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti/dibahas. Pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal dan pemberitaan media masa seputar masalah penelitian atau dapat juga diambil dari berbagai dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian mengenai kompetensi pemerintah desa dalam pembangunan desa Surya Indah.

Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik diskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklafikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Pemerintah desa sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll) maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat keterangan tidak mampu, SKCK, SIUP, urusan – urusan pertanahan ataupun surat keadministrasian lainnya. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang terdapat dalam organisasi pemerintahan Desa.

Kompetensi pemerintah desa dalam hal pembangunan desa dapat diukur dari beberapa aspek sebagai berikut, Pemerintah desa harus memiliki pengetahuan (*knowledge*) yang berkaitan dengan program pembangunan desa, Pemerintah desa harus memiliki keterampilan (*skills*) teknis dan manajemen untuk merancang program pembangunan desa dan Pemerintah desa harus memiliki sikap (*attitude*) yang baik dalam pelayanan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Pemerintah desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus



dilaksanakan dalam pemerintahan desa untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat desa. Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa telah tertuang pada Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Berikut kutipan wawancara dengan Pak Sugito selaku Kepala desa mengenai hal tersebut:

***“Sebagai kepala desa tentu ada tugas yang harus saya jalankan terutama untuk memimpin desa ini. Pada awal saya menjabat sebagai kepala desa tentu saya sudah mempelajari tentang tugas dan fungsi saya sebagai kepala desa. Salah satu tugas saya yaitu menyusun dan merancang peraturan desa. Selain itu juga jadi perwakilan desa dalam rapat tingkat kecamatan bersama kepala desa dari desa lain juga. Tentu tugas-tugas ini bukan tugas yang ringan, namun dengan kesungguhan dan kerjasama dengan perangkat desa dan masyarakat desa, tugas –tugas ini dapat berjalan lebih mudah.”***

Keterampilan adalah kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit. Indikator kompetensi ketrampilan/keahlian, dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa (menyusun program, membuat perencanaan program, merancang implementasi program, mengawasi dan mengevaluasi program), Kemampuan manajerial, dilihat dari kemampuan kepala desa dalam memimpin dan menggerakkan

bawahan/perangkat desa dan masyarakat.

Kutipan wawancara dengan Pak Purwoto selaku Kepala Urusan Pembangunan terkait keterampilan pemerintah desa dan pembangunan desa,

***“Kami selaku aparat desa selalu berusaha untuk merancang pembangunan yang baik untuk masyarakat seiring dengan visi desa membangun. Hubungan pemerintah desa dengan masyarakat juga baik, walaupun masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat, tapi kami berusaha meyakinkan masyarakat. Menurut saya, Bapak Kades memiliki visi yang bagus dan dapat dipercaya, namun beliau masih jarang bertemu langsung dengan masyarakat.”***

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan penuh dari masyarakat. Pemerintah desa selaku pihak yang merencanakan pembangunan perlu melaksanakan interaksi yang sehat dengan masyarakatnya sehingga dukungan dari masyarakat dapat diperoleh dengan penuh.

Berikut kutipan wawancara dengan Pak Parlan selaku masyarakat desa mengenai apakah pemerintah desa memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam segi pembangunan desa.

***“Kalau di kantor desa itu bagus pelayanannya, ada juga pegawainya. Tapi kalo udah jam***

***lewat jam 12 udah gak ada lagi pegawainya. Padahal masih banyak masyarakat yang mau ngurusin ini itu. Jadi masyarakat banyak yang ngeluh. Kalau pagi kali juga belum ada pegawainya jam 10 baru ada, masih di kaplingnya paling (kata pak parlan diiringi dengan tawa)."***

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Surya Indah Kecamatan Surya Indah Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Surya Indah diperoleh bahwa pendidikan formal pemerintah desa Surya Indah rata-rata adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu 75 %, sedangkan sisanya Sekolah Dasar sebanyak 12,5 % sedangkan Perguruan Tinggi sebanyak 12,5%. Pendidikan formal pemerintah desa Surya Indah tergolong tinggi. Hal ini mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki pemerintah desa.

Berdasarkan data dokumentasi desa, diperoleh bahwa pelatihan yang diperoleh pemerintah desa hanya sebanyak 1 kali per tahun berupa studi banding dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan daerah. Pelatihan dan pembinaan pemerintah Desa perlu dilaksanakan sehingga pemerintah desa menjadi paham dan terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data anggaran dana desa, diketahui bahwa anggaran pembangunan desa sebanyak 70,45 % sedangkan pembinaan masyarakat termasuk pemerintah desa hanya sebesar 1,78 %. Hal ini sangat

bertolak belakang, mengingat program pembangunan dengan dana yang cukup besar tidak didukung oleh pelatihan dan pembinaan pemerintah desa yang berperan penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan desa.

Berdasarkan data dan observasi diperoleh bahwa masa kerja pemerintah Desa Surya Indah memasuki tahun ke 4. Seharusnya masa pemerintahan selama 4 tahun telah memberikan pengalaman yang cukup banyak kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat kurang memberikan dukungan kepada pemerintah desa karena kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat sekitar.

Dalam segi pelaksanaan pelayanan administrasi dan program pembangunan semakin baik setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil pembangunan yang telah mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa Surya Indah seperti Jalan beton, sumur bor dan lain-lain. Faktor – faktor yang mempengaruhi Pembangunan Ketenagakerjaan Pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

Pembangunan Desa Surya Indah

Pembangunan Desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan

masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong – royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Indikator pencapaian pembangunan desa Surya Indah dapat diukur melalui (1) partisipasi masyarakat, (2) kesetaraan peran masyarakat dan pemerintah, (3) kemandirian masyarakat, dan (4) taraf hidup masyarakat.

Kutipan wawancara terkait hal tersebut. Kutipan wawancara dengan Pak Parlan,

***“Ya kami ikut bekerja kalau ada pembangunan. Panitiaya juga dibentuk per RW nya. Bersama-sama membangun jalan beton yang dekat lapangan itu. Jadi kasih pendapat juga kalau semennya kurang atau kerikilnya kurang. Kalau kayak gedung aula itu pekerja yang bangun tapi tetap dari masyarakat kita di desa. Karena kan gak semua masyarakat bisa bangun gedung. Kalau rapat ya kadang ikut saya kadang gak, malas ikut kadang.”***

Pembangunan desa Surya Indah secara fisik dapat terlihat dari sarana dan prasarana yang tersedia di desa Surya Indah. Desa Surya Indah telah membangun jalan aspal dan jalan beton sebagai sarana transportasi yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan sektor kehidupan, terutama sektor

ekonomi kemasyarakatan. Selanjutnya pembangunan Aula Desa sebagai tempat peningkatan partisipasi, aspirasi dan kegiatan seni dan olahraga yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Surya Indah. Penyediaan air bersih melalui program sumur bor yang ditempatkan di beberapa tempat di desa Surya Indah juga merupakan hasil pembangunan secara fisik di desa Surya Indah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi pemerintah desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam Pembangunan dapat dilihat dari aspek yaitu: 1. Pemerintah desa memiliki pengetahuan (*knowledge*) berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan desa; pemerintah Desa Surya Indah memiliki kompetensi pengetahuan yang baik dalam bidang pemerintahan mengenai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki pengetahuan yang baik mengenai program pembangunan desa sesuai dengan tata cara yang berlaku. 2. Pemerintah desa memiliki keterampilan (*skills*) dalam teknis dan manajemen pengelolaan pembangunan desa; pemerintah Desa Surya Indah memiliki kemampuan teknis yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan namun masih kurang mampu melakukan

- pengawasan terhadap pembangunan. 3. Pemerintah desa memiliki sikap (*attitude*) dalam pembangunan desa; dalam hal ini pemerintah desa Surya Indah mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun kurang optimal dalam pelayanan dan kurang mampu berinteraksi dan bersosial dengan masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi kompetensi pemerintah desa Surya Indah dalam pembangunan desa meliputi; pendidikan formal, pelatihan dan pembinaan serta pengalaman.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, sebaiknya pemerintah Desa Surya Indah lebih bersosialisasi kepada masyarakat untuk menghimpun dukungan dan kepercayaan masyarakat sehingga roda pemerintahan dan program pembangunan desa dapat berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara. 2003. *Profil Kebutuhan PNS*. Jakarta : Puslitbang BKN
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan Teori dan Pengenalannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Palan, R. 2007. *Competency Management: Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: PPM
- Spencer. 1993. *Competence at Work Models for Superior Performance*. New York : John Willey & Son, Lc
- Supriatna, Tjahja. 2000. *Strategi Pembangunan Konsep dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Dokumen – Dokumen :**
- Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa